



LAPORAN PELAKSANAAN

Open Government
Indonesia

Tahun 2015



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

Self Assessment Report 2015

Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia 2015

Daftar Isi:

Pendahuluan: Rencana Aksi Open Government Indonesia 2015

Pencapaian Rencana Aksi

Komitmen Unggulan 2015

Penutup (Lessons Learned dan Rekomendasi)

Pendahuluan: Rencana Aksi Open Government Indonesia 2014-2015

Rencana Aksi Open Government Indonesia 2014-2015 diluncurkan pada Mei 2014 oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4). Rencana Aksi 2014-2015 merupakan Renaksi OGI yang ketiga sejak inisiatif Open Government Indonesia diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono pada Januari 2012.

Renaksi OGI 2014-2015 menyimpan keunikan tersendiri karena: 1) dari segi jumlah lebih banyak dari rencana aksi sebelumnya. Ini adalah sebuah upaya perluasan semangat dan praktek keterbukaan di lebih banyak kementerian/lembaga; 2) renaksi 2014-2015 *disusun* dan *dijalankan* di periode transisi politik baik di tahun 2014 maupun 2015. Di tahun 2014 berlangsung pemilihan umum legislatif dan Presiden, yang kemudian terjadi transisi pucuk kepemimpinan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Sepanjang tahun 2015, terkait dengan transisi politik dimaksud, kendaraan operasional OGI hanya berjalan $\frac{1}{4}$ dari kapasitas utuh sebelumnya di 2015; hal ini disebabkan berakhirnya masa tugas UKP4 per 30 Desember 2014, perpindahan kepengurusan dari UKP4 ke Kementerian PPN/Bappenas, dan proses penganggaran untuk membentuk kembali sebuah Sekretariat yang membutuhkan waktu.

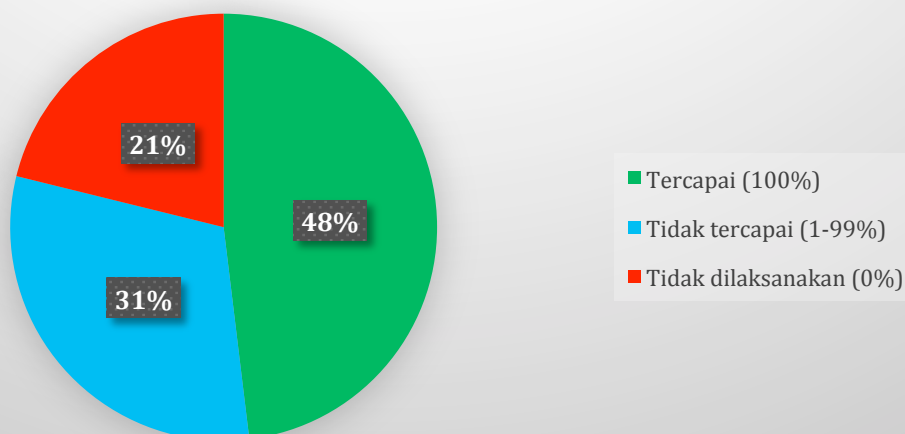
Walaupun kepengurusan OGI efektif berpindah tangan ke Kementerian PPN/Bappenas dengan fasilitasi dukungan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Luar Negeri (sering disebut 'Troika OGI') pada kuartal pertama 2015, Sekretariat OGI sebagai 'kendaraan operasional' utama dapat secara efektif beroperasi di kuartal keempat tahun 2015.

Periode transisi politik dalam proses penyusunan dan implementasi Rencana Aksi OGI 2014-2015 ditenggarai membawa konsekuensi terhadap kurang optimalnya realisasi upaya reformasi yang dicoba diusung melalui komitmen-komitmen yang tertuang di dalamnya. Tidak adanya 'kendaraan operasional' dan tidak adanya manajemen koordinasi implementasi Renaksi OGI yang memadai adalah dua hal yang melatarbelakangi rendahnya tingkat ketercapaian Renaksi OGI 2015.

Pencapaian Rencana Aksi

Secara garis besar, hasil capaian 21 Kementerian/Lembaga terhadap 52 komitmen yang tertuang di dalam Renaksi OGI 2014 adalah sebagai berikut:

Grafik Status Capaian 2015



Dari 52 komitmen, sebanyak 25 komitmen (atau sebesar 48% dari total komitmen) berhasil mencapai target capaian dan 27 komitmen tidak tercapai. Dari 27 yang tidak tercapai pada saat verifikasi hasil capaian (Januari-Februari 2016), 16 komitmen (31%) sudah mulai dijalankan namun belum mencapai target capaian dan 11 komitmen (21%) sama sekali tidak dilaksanakan ataupun tidak berhasil mendapatkan konfirmasi dari penanggung jawab terkait.

Secara ringkas, tingkat ketercapaian Renaksi OGI 2015 beserta faktor pendukungnya terangkum di dalam tabel di bawah ini.

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
Tercapai	48% (25)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan standar pelayanan publik; 2. Pembuatan dan pengembangan sistem Portal Open Data; 3. Perbaikan sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi; 4. Optimalisasi fungsi Badan Pengawas Rumah Sakit; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya landasan hukum terkait komitmen yang terlaksana 2. Renaksi/ komitmen yang disepakati tertuang di dalam rencana kerja, program, dan anggaran K/L terkait. 3. Adanya komitmen yang kuat dari unit atau K/L penanggung jawab; 4. Adanya <i>reformers</i> dalam

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
		5. Pengembangan dan implementasi saluran pengaduan di sektor kesehatan; 6. Pengembangan sistem layanan darurat kesehatan bagi publik; 7. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 8. Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP); 9. Peningkatan infrastruktur dan kualitas layanan pertanahan; 10. Peningkatan pemanfaatan data pertanahan melalui integrasi data; 11. Transparansi informasi seluruh regulasi pertanahan dalam satu dokumen terintegrasi; 12. Tersedianya standar layanan dan <i>business process</i> pengelolaan TKI secara online; 13. Penguatan akses	K/L terkait yang menjadi agen-agen keterbukaan; 5. Adanya <i>peer pressure</i> dari multi <i>multi-stakeholder group</i> terhadap target/ indikator yang harus dicapai

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
		<p>informasi terkait kesempatan kerja TKI secara online;</p> <p>14. Terbentuknya perwakilan PPTKIS di luar negeri sebagai pemberi informasi, pembina, dan help desk bagi para TKI;</p> <p>15. Pengelolaan haji yang dilakukan secara transparan dan akuntabel;</p> <p>16. Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA);</p> <p>17. Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam lingkup area EITI;</p> <p>18. Transparansi pengelolaan Sumber Daya Alam dalam rangka mendukung akuntabilitas;</p> <p>19. Transparansi pelaksanaan renegotiasi Kontrak Karya;</p> <p>20. Implementasi dan publikasi informasi Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tahun</p>	

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
		2014-2023; 21. Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui pemberdayaan masyarakat; 22. Mendorong partisipasi publik melalui pengembangan kawasan terintegrasi skala mikro; 23. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Pasar Percontohan; 24. Mendorong pemahaman publik tentang pertanian dan pemerataan kualitas petani khususnya daerah tertinggal; 25. Mendorong kontribusi petani dalam peningkatan kualitas produksi pertanian di wilayahnya.	
Tidak tercapai	31% (16)	1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik pada bidang koordinasi kesra; 2. Terbentuknya Komisi Informasi Daerah di seluruh provinsi; 3. Terlaksananya ketentuan/pedoman teknis menyangkut	1. Transisi politik dan perubahan nomenklatur beberapa kementerian ikut membawa dampak terhadap proses konsolidasi di internal kementerian yang menyebabkan

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
		<p>perlindungan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi</p> <p>4. Penguatan Infrastruktur mekanisme penyelenggaraan layanan publik;</p> <p>5. Pengembangan partisipasi publik melalui optimalisasi media pengaduan masyarakat;</p> <p>6. Mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring kualitas pelayanan publik melalui mekanisme pemeringkatan kualitas layanan;</p> <p>8. Peningkatan jumlah pemerintah daerah yang mengeluarkan Standar Pelayanan sebagai acuan kualitas pelayanan publik;</p> <p>9. Transparansi proses penyelesaian pengaduan</p>	<p>beberapa target capaian belum dapat terpenuhi</p> <p>2. Kurang efektifnya komunikasi selama masa penyusunan dan penetapan renaksi</p> <p>3. Beberapa K/L belum memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>4. Tingkat komitmen K/L yang berbeda-beda terhadap realisasi atas target yang sudah disepakati</p> <p>5. Pemotongan anggaran di tengah tahun berjalan</p> <p>6. Rendahnya level komitmen untuk berkolaborasi maupun menjadi agen keterbukaan di masing-masing unit kerja</p> <p>7. Kurang optimalnya koordinasi, baik di intra kementerian maupun inter-kementerian</p> <p>8. Tidak tersedianya informasi yang jelas terhadap</p>

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
		masyarakat; 10. Pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara online; 11. Penyederhanaan prosedur dan pelaksanaan layanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB secara online; 12. Pengawasan pelayanan publik di bidang pengaturan arus lalu lintas; 13. Pencegahan fatalitas kecelakaan lalu lintas; 14. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pembinaan bagi organisasi kepemudaan 15. Transparansi pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan minerba; 16. Pembinaan kaum miskin di perkotaan melalui sentralisasi lokasi pembinaan.	pelaksanaan renaksi yang menyulitkan dilakukannya proses monitoring dan evaluasi
Tidak dilaksanakan	21% (11)	1. Mendorong transparansi di lingkungan perguruan tinggi; 2. Peningkatan kualitas guru/dosen	1. Tidak adanya kesepakatan di awal antara UKP4 dengan K/L penanggung jawab terhadap komitmen

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
		<p>melalui metode pembelajaran online;</p> <p>3. Mendorong kegiatan riset dan kegiatan aplikasi teknologi terapan;</p> <p>4. Transparansi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dalam setiap tahapannya di sector migas dan minerba;</p> <p>5. Transparansi informasi menyangkut aktivitas pengelolaan produk kehutanan;</p> <p>6. Peningkatan kinerja lembaga DPR-RI dan DPRD melalui publikasi informasi kepada publik;</p> <p>7. Mendorong transparansi dan akuntabilitas Lembaga DPR-RI;</p> <p>8. Implementasi sistem pengumpulan dan publikasi informasi mengenai pelepasan dan transfer B3 ke media lingkungan;</p> <p>9. Implementasi UU KIP dan mandat keterbukaan di UU Sektor di sektor</p>	<p>2. Kurang efektifnya komunikasi selama proses perumusan dan penetapan renaksi</p> <p>3. Tidak tertuangnya renaksi di dalam rencana kerja dan anggaran K/L</p> <p>4. Renaksi tidak dijalankan karena tidak sesuai kewenangan atau tupoksi K/L</p> <p>5. Rendahnya level komitmen untuk berkolaborasi maupun menjadi agen keterbukaan di masing-masing unit kerja</p> <p>6. Tidak tersedianya informasi yang jelas terhadap pelaksanaan renaksi yang menyulitkan dilakukannya proses monitoring dan evaluasi</p>

Tingkat Keberhasilan/ Ketercapaian	Prosentase (jumlah)	Area Pengembangan	Faktor Pendukung
		kehutanan dan lingkungan hidup; 10. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan menyangkut lingkungan hidup; 11. Mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup daerah pesisir.	

Secara utuh, Tabel Capaian Rencana Aksi Open Government Indonesia 2015 terlampir **LAMPIRAN A**.

Sebagai perbandingan, di bawah ini adalah tabel tingkat ketercapaian 100% renaksi OGI dari tahun 2012.

	2012	2013	2014	2015
Jumlah KL	14	13	24	21
Renaksi	38	21	64	52
Capaian (100%)	76.6	85.7	54.7	48

Komitmen Unggulan 2015

Komitmen unggulan didefinisikan sebagai komitmen yang jika diselesaikan berpotensi membawa dampak transformatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat luas. Berdasarkan kriteria dimaksud, ada dua komitmen unggulan yang menjadi bagian dari Rencana Aksi 2014 dan terus dilanjutkan di tahun 2015. Dua komitmen ini merupakan refleksi keseriusan pemerintah Indonesia untuk membentuk pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel dengan pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan.

1.) Inisiatif Open Data Indonesia

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka peningkatan pelayanan publik, maupun peningkatan kualitas kebijakan publik

adalah minimnya sinergitas tata kelola data dan informasi antar kementerian/lembaga yang dapat membantu menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan terbuka untuk dibagi-pakai antar pemangku kepentingan. Inisiatif Open Data Indonesia berupaya menjawab tantangan tersebut.

Inisiatif yang diluncurkan pada tahun 2014 ini berupaya menyediakan data yang mudah diakses dan dipergunakan kembali dalam satu portal, yang dinamakan Portal Data Indonesia: data.go.id.

Portal Data Indonesia (data.go.id) sampai dengan Desember 2015 telah tersambung ke 31 instansi dengan rincian: 14 Kementerian; 10 Lembaga; 3 Pemda (Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bandung, Pemkab Bojonegoro); 1 BUMN (PT. KAI); 3 instansi/organisasi/sumber data lainnya: EITI, LAPOR!, Indodapoer.

Sebagai salah satu negara di dunia yang menggeluti upaya 'open data', sejak 2014 Indonesia secara sukarela ikut serta di dalam evaluasi global Open Data yang dinamakan 'Open Data Barometer' yang diselenggarakan World Wide Web Foundation, Open Knowledge International (OKFN), dan OECD Open Data Review.

Di dalam pemeringkatan Open Data Barometer 2015¹, Indonesia menduduki peringkat 40, turun 4 peringkat dari posisi ke-36 di tahun 2014. Salah satu faktor turunnya peringkat Indonesia adalah tidak ditemukan upaya-upaya signifikan di dalam mendorong inisiatif open data ini di tahun 2015. Penurunan peringkat ini bisa dipahami, mengingat adanya proses transisi politik yang terjadi di penghujung tahun 2014. Selain itu upaya sosialisasi maupun mendapatkan *buy-in* dari Kementerian/Lembaga terhadap konsep data terbuka juga ditenggarai seperti sebuah upaya merubah cara kerja atau *culture* yang sudah berpuluh-puluh tahun terinternalisasi sebelumnya di dalam birokrasi pemerintahan.

Mengingat pentingnya agenda perbaikan tata kelola data di Indonesia, upaya mengkonsolidasikan komitmen lebih banyak kementerian/lembaga untuk membenahi isu open data akan terus dikembangkan di dalam Renaksi OGI 2016-2017.

2.) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

Beroperasinya saluran umpan balik dari publik adalah cara paling efisien untuk mengetahui kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Akuntabilitas pemerintah salah satunya ditentukan melalui responsivitas pemerintah di dalam menindaklanjuti setiap kebutuhan warga. Inisiatif LAPOR dikembangkan untuk memastikan tersedianya saluran bagi

¹ Lebih detail informasi mengenai penilaian open data barometer, dapat dilihat di <http://opendatabarometer.org>

masyarakat untuk menyampaikan aduan ataupun aspirasi mereka terkait pelayanan publik yang mereka terima.

LAPOR diluncurkan di tahun 2011 sebagai embrio dari sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terhubung dan dimanfaatkan di seluruh K/L dan Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi 2015 menargetkan keterhubungan LAPOR dengan 25 Provinsi/Kabupaten/Kota. Sampai dengan akhir 2015, LAPOR baru berhasil terhubung di 14 pemerintah daerah. Tantangan utama di dalam menrealisasi target dimaksud adalah tertundanya penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kantor Staf Presiden, Kementerian PANRB, dan Ombudsman RI sebagai tiga instansi penjuror yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengembangan LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional (SP4N).

Hingga April 2015, LAPOR! telah digunakan oleh lebih dari 290.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari 800 laporan masyarakat per harinya. Selain keterhubungan dengan pemerintah daerah, sampai dengan Desember 2015 LAPOR juga telah terhubung dengan 81 Kementerian/Lembaga, 70 BUMN, dan 60 Perwakilan RI di luar negeri.

Penetapan LAPOR sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dengan target keluaran utama berupa pemanfaatan sistem LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) juga semakin diperkuat melalui PermenPAN RB No. 3/ 2015 tentang Road Map Pengembangan SP4N. Implementasi peta jalan pengembangan SP4N perlu didukung koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan oleh karena itu aksi-aksi memperkuat koordinasi maupun responsivitas dari LAPOR-SP4N akan terus menjadi bagian dari Rencana Aksi OGI 2016-2017.

Penutup

Tahun 2014-2015 merupakan periode transisi politik yang membawa sejumlah dampak terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Open Government Indonesia maupun pengelolaan Sekretariat Open Government Indonesia secara keseluruhan. *Lessons learned* dan rekomendasi dari Laporan Implementasi Rencana Aksi OGI 2014 tetap valid dijadikan masukan bagi pemangku kepentingan terkait di dalam manajemen pengelolaan OGI.

Tiga *lessons learned* tambahan untuk implementasi Aksi 2015 secara spesifik antara lain:

- 1) Terbentuknya Sekretariat Nasional OGI hampir di penghujung 2015, menyebabkan tidak adanya mesin penggerak OGI yang secara khusus melakukan pemantauan atau upaya *debottlenecking* terhadap aksi-aksi yang

berpotensi tidak tercapai. Konsekuensinya adalah secara praktis selama tahun 2015 komunikasi dua arah antara Sekretariat dengan instansi penanggung jawab *sangat minim* terjalin dan oleh karena itu resiko ketidaktercapaian tidak berhasil termitigasi dengan baik;

- 2) Periode transisi politik dan absennya dukungan operasional dari Sekretariat Nasional di tahun 2015 menyebabkan kurangnya koordinasi antara Tim Inti OGI yang terdiri atas perwakilan 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga dan 7 (tujuh) organisasi masyarakat sipil. Di masa kepemimpinan UKP4, Tim Inti ini menjadi salah satu *enabling environment* terhadap ketercapaian komitmen-komitmen di dalam Rencana Aksi sebelumnya.
- 3) Proses penyusunan rencana aksi yang belum terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah menjadi salah satu faktor utama ketidaktercapaian banyak aksi. Hampir 50% dari aksi yang tidak tercapai bukan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah dan alhasil tidak menjadi komitmen dan konsekuensinya tidak teranggarkan.

Dari refleksi pembelajaran di atas, laporan ini hendak merekomendasikan 3 (tiga) langkah strategis dalam pengelolaan OGI di masa mendatang:

- 1) Perlu dirumuskan sebuah dokumen peta jalan pemerintahan terbuka, sebagai acuan bersama para pihak terkait kebijakan pemerintahan terbuka. Di sisi lain, peta jalan dapat menjadi pedoman untuk merumuskan target capaian serta strategi yang diperlukan. Dengan demikian, dokumen ini dapat menjadi media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- 2) Kesuksesan implementasi Rencana Aksi perlu dilihat sebagai sebuah upaya bersama baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah perlu mulai mempertimbangkan upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lainnya seperti misalnya organisasi masyarakat sipil agar secara konstruktif dapat berkontribusi, bukan hanya dalam proses perumusan rencana aksi, namun juga sampai dengan proses implementasi dan pemantauan capaian rencana aksi (*from co-creation to co-implementation and co-monitoring*).
- 3) Penyelarasan siklus pembahasan Rencana Aksi OGI dengan tahapan perencanaan dan penganggaran perlu terus diupayakan. Jika dilakukan dengan benar, secara otomatis juga akan membantu pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan (*good governance*).
